

**PENGARUH COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2015
TERHADAP PERDAGANGAN BATUBARA INDIA – INDONESIA**

Oleh: Iqbaal Muhammad

(iqbaal_muhammad@yahoo.co.id)

Pembimbing: Indra Pahlawan S.IP, M.Si

Bibliografi: 2 Jurnal, 1 Buku, 4 Dokumen Resmi, 8 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Ekonomi Politik Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Pekanbaru – Riau 28293

Telp: 0761-63272 / Faks: 0761-566821

Abstract

This research aims to find the effect of Coal Mines (Special Provisions), Act 2015 on coal mining industry in Indonesia. Coal Mines (Special Provisions), Act 2015 is an Act that aims to utilize coal optimally and expected to reduce dependence on imported coal.

This research uses explanative research methods and literature studies as data collection techniques. The researcher uses the perspective of dependency with the nation state as a level of analysis and uses the concept of national energy policy.

The results of this study shows Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 has a negative influence on the Indonesian coal industry such as Reliance Coal Resources which sells their coal mines in Indonesia and the volume of coal exports to India is decreased.

Keywords : Act, Coal, India, Indonesia, Trade

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia dan memiliki cadangan batubara mencapai 26,2 miliar ton pada tahun 2017. Pulau Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki cadangan batubara terbesar, yaitu sebesar 14,9 miliar ton dan pulau Sumatera sebesar 11,2 miliar ton.¹ Terdapat perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri pertambangan batubara, seperti Bukit Asam, *Adaro Energy*, *Kaltim Prima Coal*, dan lainnya.

Pada tahun 2016, produksi batubara Indonesia sebesar 419 juta ton.² Mayoritas batubara diekspor ke berbagai negara, seperti India, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Volume ekspor yang tinggi terjadi karena produksi yang mengalami surplus dan tingginya permintaan batubara dari negara lain, terutama negara-negara di Asia.

India dan Tiongkok merupakan dua negara importir terbesar batubara Indonesia. Kedua negara ini membutuhkan tambahan pasokan batubara untuk mendukung industri dan pembangunan di negara mereka. Kebutuhan batubara sebagai sumber tenaga pembangkit listrik pada kedua negara sangat besar karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan industri

sedang berkembang pesat. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan batubara dalam negerinya, Tiongkok dan India melakukan impor batubara dari berbagai negara.

Pada tahun 2015/16, konsumsi batubara India sebesar 832 juta ton dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.³ Mayoritas batubara di India digunakan untuk pembangkit listrik. Kebutuhan yang tinggi akan batubara dan produksi yang tidak memenuhi kebutuhannya tersebut membuat India melakukan impor dari beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya akan batubara.

Indonesia merupakan negara pengekspor batubara terbesar bagi India. Sejak tahun 2005 sampai 2014, impor batubara dari Indonesia menuju India selalu naik setiap tahunnya hingga puncaknya pada tahun 2014 dengan nilai impor mencapai 136 juta ton.⁴ Pada tahun 2015, peningkatan volume impor tersebut menurun 12 juta ton karena adanya *Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015*.

Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 merupakan pembaharuan dari *The Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973* yang dikeluarkan pada tahun 1973. *The Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973* merupakan undang-undang

¹ Tim Komunikasi ESDM. *Cadangan Batubara Indonesia Sebesar 26 Miliar Ton*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton> pada 13 Mei 2018

² Kementerian BUMN. *Batubara di Indonesia*. Diakses melalui <http://bumn.go.id/bukitasam/berita/2-Batubara-di-Indonesia-Produksi-Ekspor-Batubara-Indonesia> pada 7 November 2018

³ Ministry of Mines India. *Indian Minerals Yearbook 2017: Part III Mineral Reviews*. Diakses melalui http://ibm.nic.in/writereaddata/files/03202018145834Coal%20and%20Lig_AR_2017.pdf pada 4 Maret 2019

⁴ Badan Pusat Statistik. *Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan Utama*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statistictable/2014/09/08/1034/ekspor-batu-bara-menurut-negara-tujuan-utama-2002-2015> pada 5 April 2018

(UU) yang mengatur mengenai akuisisi dan pengalihan hak milik tambang batubara. Ketentuan tersebut bertujuan untuk pemanfaatan, kepemilikan, dan pengendalian tambang batubara dikendalikan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama

Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 merupakan UU yang disetujui oleh pemerintah India pada 30 Maret 2015. UU ini memperbolehkan perusahaan swasta untuk mengeksplorasi tambang batubara di India. UU ini bertujuan untuk efisiensi pada sektor batubara, mengurangi ketergantungan impor batubara, ketahanan energi, dan pembangunan ekonomi daerah di sekitar tambang.

Ketentuan tersebut memiliki pengaruh terhadap Indonesia, di antaranya adalah perginya perusahaan batubara asal India dari Indonesia dan penurunan ekspor batubara ke India. *Reliance Group*, melalui unit usahanya *Reliance Coal Resources*, menjual tiga tambang batubara di Sumatera Selatan pada tahun 2010. Penjualan tiga tambang tersebut dilakukan untuk berfokus kepada produksi batubara di India yang memiliki cadangan batubara yang lebih besar.

KERANGKA TEORI

Perspektif: Dependensi

Dependensi lahir pada akhir 1950-an sebagai jawaban atas kegagalan program dari *United Nations Economic Commission for Latin America (UNECLA)* yang berada di bawah pimpinan Raul Prebisch. Program tersebut dinilai gagal karena teori modernisasi yang digunakan pada program ini tidak

berhasil diterapkan di negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga. Modernisasi dipakai karena berhasil diterapkan di Eropa atau pada negara-negara maju.

Theotonio Dos Santos, salah satu tokoh dependensi, mendefinisikan dependensi sebagai berikut:⁵

"Ketergantungan adalah kondisi historis yang membentuk struktur tertentu dari ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga menguntungkan beberapa negara dengan merugikan negara lain dan membatasi kemungkinan pengembangan ekonomi bawahan ... sebuah situasi di mana ekonomi kelompok negara tertentu dikondisikan oleh pengembangan dan perluasan ekonomi lain, yang menjadi sasaran ekonomi mereka sendiri."

Menurut Prebisch, negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi jika ingin membangun negaranya. Industrialisasi dimulai dengan substitusi impor. Barang-barang industri yang pada awalnya diimpor, harus diproduksi di dalam negeri. Industri-industri dalam negeri yang masih baru harus dilindungi dari industri-industri besar oleh

⁵ Dos Santos, Theotonio. *The Structure of Dependence*. in K.T. Fann and Donald C. Hodges, eds., *Readings in U.S. Imperialism*. Boston: Porter Sargent, 1971, p. 226 pada Ferraro, Vincent. 1996. *Dependency Theory: The Introduction*. Massachusetts. Mount Holyoke College. Diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/d715/82f1a87a914036b3af3696b2be5e8411a7c8.pdf> pada 27 November 2019

pemerintah melalui kebijakan proteksi. Jika industri-industri tersebut telah besar dan dapat bersaing dengan industri-industri yang sudah besar terlebih dahulu, maka kebijakan proteksi harus ditarik kembali.

Terdapat tiga permasalahan yang membuat kebijakan tersebut sulit dilakukan. Pertama, pasar domestik negara-negara berkembang yang tidak cukup besar bagi negara-negara maju untuk menjaga harga tetap rendah. Kedua, perubahan menjadi produsen dimungkinkan atau diinginkan. Ketiga, apakah negara-negara berkembang memiliki kendali atas produk-produk mereka terutama pada ekspor.

Tingkat Analisa: Negara Bangsa

Menurut Mohtar Mas'ood, terdapat lima tingkat analisa yang dapat digunakan dalam penelitian HI, yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, pengelompokan negara-negara, dan sistem internasional.⁶ Pada penelitian ini, tingkat analisa yang digunakan oleh peneliti adalah Negara-Bangsa. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan dapat memaksakan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya. Negara dapat diartikan sebagai organisasi kekuasaan, kekuatan politik, dan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur.

David Singer menyebutkan dua level analisis, yaitu mikro dan makro.⁷ Level mikro mencakup

state-system label, nation-state dan *decision making level*, sementara level makro memiliki dua tingkat, yaitu nasional dan internasional. *Nation-state* adalah unit yang menganalisis bahwa ada indikator-indikator yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, seperti budaya, sejarah, agama, sosial, ekonomi, geografi, demografi dan sebagainya.

Konsep: National Energy Policy

Kebijakan dalam bidang energi berkaitan dengan industri listrik, batubara, minyak dan gas, nuklir, energi terbarukan, dan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan konsumsi energi. Kebijakan energi didefinisikan sebagai strategi untuk pengelolaan keseimbangan energi dan berkaitan dengan keamanan energi.

Interational Energy Agency (IEA) mendefinisikan keamanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau.⁸ Pada keamanan energi jangka panjang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi, sementara pada jangka pendek berfokus pada kemampuan untuk segera bereaksi terhadap perubahan dalam keseimbangan permintaan dan penawaran.

⁶ Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Displin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

⁷ Singer, J. David. 1961. "The Level-of-Analysis Problem in International Relations." *World Politics*. Vol. 14, No. 1.

Tersedia di http://fbemoodle.emu.edu.tr/pluginfile.php/43812/mod_resource/content/1/Singer%20Levels%20of%20Analysis%20Problem%20in%20IP.pdf (diakses pada 30 Oktober 2018)

⁸ International Energy Agency. What is energy security?. Diakses melalui <https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/> pada 7 Oktober 2019

Permasalahan keamanan energi dapat berakibat pada permasalahan publik. permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya, yaitu hubungan dengan negara lain, transportasi, industri, lingkungan, dan lainnya. Permasalahan dapat terjadi karena sektor-sektor tersebut membutuhkan energi yang cukup sebagai penggerak kehidupan pada sektor tersebut. Industri merupakan sektor yang terpenting karena industri membutuhkan energi yang besar dan jika kebutuhan energi tidak tercukupi akan berakibat pada sektor-sektor kehidupan lain yang berkaitan.

Di India, terdapat empat tujuan utama kebijakan energi India, yaitu akses dengan harga terjangkau, peningkatan keamanan dan kemandirian, keberlanjutan yang lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi.⁹ Kebijakan energi India selama bertahun-tahun secara langsung bertujuan untuk meningkatkan konsumsi energi (dan listrik) per kapita.

Peningkatan keamanan energi terkait dengan berkurangnya ketergantungan impor yang merupakan tujuan kebijakan ini. Keamanan energi dapat ditingkatkan melalui diversifikasi sumber impor, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengurangan kebutuhan energi. Akhirnya, kebijakan energi juga harus mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Negara India

⁹ NITI Aayog. Draft *National Energy Policy*. Diakses melalui https://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-ID_27.06.2017.pdf pada 1 Oktober 2019

India adalah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan yang terletak di antara beberapa negara, seperti Pakistan, Tiongkok, Nepal, Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka. Pada wilayah perairan, posisi India berada di antar Laut Arab di bagian barat dan Teluk Bengal di bagian timur. Secara geografis, India memiliki posisi yang strategis terutama dalam jalur perdagangan dunia sehingga banyak kapal-kapal dagang dari berbagai negara melewati dan berhenti di India.

India merupakan negara yang merdeka dari jajahan Inggris pada 15 Agustus 1947 dan resmi menjadi Republik India pada 26 Januari 1950. India yang pernah dijajah dan merdeka dari Inggris membuatnya menjadi negara anggota persemakmuran Inggris. Setelah merdeka pada tahun 1947, wilayah barat India yang mayoritas penduduknya beragama Islam memisahkan diri dari India yang mayoritas penduduknya Hindu dan membentuk negara sendiri, yaitu Pakistan.

India saat ini beribu kota di New Delhi dan memiliki 29 negara bagian serta 7 negara bagian teritori. Sistem pemerintahan India memiliki kesamaan dengan sistem pemerintahan Inggris yang merupakan negara yang pernah menduduki atau menjajah India, yaitu Republik Parlementer. Sistem pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada saat ini, Ram Nath Kovind menjabat sebagai Presiden sejak tahun 2017 dan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2014.

India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan jumlah penduduk sekitar 1.33 miliar jiwa pada tahun 2017.¹⁰ Ibu kota New Delhi menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar di India dan diikuti oleh Mumbai dan Kolkata. Sekitar 79 persen penduduk India beragama Hindu dan sekitar 21 persen lainnya menganut agama Islam, Kristen, Sikh, dan kepercayaan lainnya. Bahasa Hindi menjadi bahasa mayoritas dan resmi di India serta bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua untuk penduduk India.

Pada bidang ekonomi, India merupakan negara-bangsa yang dikenal dengan pedagang-pedagangnya yang melakukan perdagangan menuju banyak negara termasuk wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2017, India memiliki *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar US\$ 2.651 triliun dan pendapatan per kapita sebesar US\$ 1.790.¹¹ Jumlah tersebut membuat India menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan masuk menjadi anggota G-20.

Pada tahun 2017, India memiliki jumlah pekerja lebih dari 521 juta pekerja dan persentase pengangguran sebesar 8,5 persen.¹² Jumlah tersebut membuat India menjadi negara dengan jumlah penduduk yang bekerja terbanyak

kedua di dunia. Sekitar setengah dari penduduk India bergantung pada sektor agrikultur dan sisanya pada sektor jasa dan industri. Produk-produk seperti, beras, gandum, kapas, dan teh menjadi produk ekspor unggulan dari sektor agrikultur. Pada sektor industri, komoditas ekspor unggulan berupa tekstil, bahan kimia, baja, dan mesin.

Hubungan India – Indonesia

Hubungan bilateral antara India dan Indonesia secara resmi dimulai sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1950-an atau beberapa tahun setelah kedua negara merdeka. Soekarno dan Jawaharlal Nehru merupakan dua pemimpin negara pada saat itu dan juga bapak pendiri atau *founding father* masing-masing negara. Soekarno dan Nehru merupakan teman baik, saat perayaan kemerdekaan India yang pertama, pada 26 Januari 1950, Soekarno hadir sebagai tamu kehormatan.

Kerjasama India – Indonesia pada ruang lingkup regional, terdapat pada dua kerjasama, yaitu EAS dan ASEAN-India. EAS merupakan forum regional untuk membahas dan menghasilkan kesepakatan maupun kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, energi, perubahan iklim, dan lainnya. ASEAN-India merupakan kerjasama kemitraan yang dimulai pada tahun 1992. Kerjasama ini meliputi berbagai bidang, seperti politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Kerjasama multilateral kedua negara pertama dilakukan pada tahun 1955. Kerjasama ini terjadi karena kedua kepala negara memiliki pemikiran yang sama mengenai terciptanya dunia tanpa kolonialisme yang terdapat di dalam KAA.

¹⁰ World Bank. *India*. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/country/india> pada 10 Mei 2019

¹¹ *Ibid*

¹² Central Intelligence Agency. *The World Factbook*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html> pada 8 Juli 2019.

Pemikiran yang sama kembali tertuang dalam Konferensi GNB pada tahun 1961 karena memiliki tujuan dan prinsip yang hampir sama. GNB bertujuan untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, melawan imperialisme-kolonialisme, agresi militer, hegemoni, blok politik, dan lainnya.

Pada kerjasama perdagangan, kedua negara sudah melakukan perdagangan sejak beberapa abad yang lalu dan terus dilakukan hingga saat ini. Kerjasama perdagangan kedua negara secara resmi dilakukan pada tahun 1968 melalui *Trade Agreement between the Government of India and the Government of the Republic of Indonesia*. Kerjasama terbesar kedua negara dilakukan pada tahun 2005 saat Presiden SBY berkunjung ke India. Presiden SBY dan PM Manmohan Singh, mendeklarasikan *New Strategic Partnership* dan menyetujui perdagangan antara kedua negara dengan nilai US\$ 10 miliar pada 2010.

Tinjauan Umum *Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015*

Sektor pertambangan batubara memberikan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor berkontribusi besar terhadap pajak kepada negara. Industri pertambangan batubara ini juga memainkan peran dalam memastikan ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik, bahan baku untuk industri baja dan industri penting lainnya.

Pada *Coal Mine (Nationalisation) Act, 1973*, pertambangan batubara awalnya dikhususkan untuk sektor publik secara eksklusif. UU tersebut

diamandemen dari waktu ke waktu. Sektor swasta mulai diperbolehkan untuk melakukan eksplorasi kembali melalui beberapa amandemen. Amandemen dilakukan dengan salah satu tujuannya untuk memperbolehkan sektor swasta untuk eksplorasi batubara namun dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah.

Pada tahun 1971, pemerintah India mulai melakukan nasionalisasi tambang batubara swasta. Pada tahun 1973, dikeluarkan *Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973* yang bertujuan untuk memperluas hak pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan 711 tambang batubara di tujuh negara bagian, termasuk tambang batubara yang diambil alih pada tahun 1971. Hal tersebut diikuti oleh nasionalisasi semua tambang pada 1 Mei 1973 dengan diberlakukannya *UU Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973*.

Sebuah perusahaan induk batubara bernama *Coal India Limited (CIL)*, yang berada di bawah Kementerian Batubara, dibentuk pada November 1975. Pada tahun 1976, UU tersebut diamandemen dengan dua perubahan, yaitu diperbolehkannya penambangan oleh sektor swasta yang terlibat dalam produksi besi dan baja, dan sub-sewa untuk penambangan batubara ke pihak swasta di tempat-tempat kecil yang terisolasi. Diperlukannya menambah pembangkit listrik termal dan menambah kapasitas daya membuat pemerintah India memutuskan untuk mengizinkan partisipasi swasta di sektor listrik.

Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 kembali diamandemen pada tahun 1993. Amandemen ini memungkinkan penambangan

batubara untuk *captive consumption* (penggunaan sendiri dan tidak untuk dijual) untuk pembangkit listrik, pencucian batubara yang diperoleh dari tambang, dan lainnya. Amandemen ini berlaku untuk sektor publik dan sektor swasta yang ingin menambang batubara untuk *captive consumption*.

Pada tahun 1997, Kementerian Energi mengusulkan untuk mengamandemen kembali UU tersebut untuk mempromosikan *non-captive private mining of coal*. Pada tahun 1998, usulan tersebut diperiksa kembali dan standar tertentu harus dipertahankan oleh sektor swasta sehingga permasalahan dalam pertambangan batubara tidak terjadi kembali. Kabinet menyetujui usulan untuk mengamandemen UU tersebut dan dirujuk ke *Standing Committee on Energy* untuk dipertimbangkan.

Pasca beberapa kali amandemen UU nasionalisasi, pada 18 Februari 2015, pemerintah India mengeluarkan *Coal Mines (Special Provisions), Bill 2015*. *Coal Mines (Special Provisions), Bill 2015* merupakan rancangan undang-undang (RUU) untuk menyediakan dan pemberian hak, kepemilikan, dan kepentingan atas tambang batubara kepada para penawar (perusahaan). RUU ini bertujuan untuk memastikan produksi batubara dan pemanfaatan batubara dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan nasional.

RUU tersebut diusulkan untuk memanfaatkan batubara dalam negeri secara optimal untuk kepentingan nasional. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan batubara yang tinggi hingga beberapa tahun ke depan pada sektor pembangkit listrik dan keperluan industri. RUU ini juga diharapkan agar produksi batubara

dapat meningkat melalui pemberian blok-blok tambang batubara kepada perusahaan publik maupun swasta melalui metode lelang dan penawaran.

Terdapat beberapa alasan lain mengenai dikeluarkannya RUU tersebut, seperti meminimalkan dampak pada sektor-sektor inti seperti baja, semen, dan listrik yang sangat penting untuk pembangunan; meningkatkan daya saing; beralih dari padat karya menjadi padat teknologi; lapangan kerja bagi penduduk di wilayah-wilayah yang terdapat tambang batubara; dan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dan penduduk di sekitar tambang batubara.

Pada tanggal 30 Maret 2015, pemerintah India melalui *Lok Sabha* (Legislatif India) mengesahkan RUU tersebut menjadi *Coal Mines (Special Provisions), Act 2015*. *Coal Mines (Special Provisions), Act 2015* merupakan UU untuk menyediakan dan pemberian hak, kepemilikan, dan kepentingan atas tambang batubara kepada para penawar (perusahaan). UU ini bertujuan untuk memastikan produksi batubara dan pemanfaatan batubara dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan nasional.

UU tersebut bertujuan untuk memanfaatkan batubara secara optimal sehingga dapat meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. UU yang bertujuan untuk optimalisasi batubara ini diharapkan juga dapat menekan atau mengurangi ketergantungan terhadap batubara impor. UU ini memberikan kesempatan lebih besar bagi sektor swasta untuk melakukan eksplorasi batubara.

Pada Oktober 2015, pemerintah India telah melakukan tiga tahap lelang tambang batubara. Dua tahap pertama lelang batubara untuk 40 blok tambang diselenggarakan pada Februari hingga April 2015. Pada lelang tahap pertama akan membuat negara bagian yang memiliki batubara akan mendapatkan pendapatan sekitar Rs. 2,85 *Lakh Crore* dalam 30 tahun.¹³ Perusahaan-perusahaan bidang listrik dan non-listrik dapat ikut berpartisipasi dalam pelelangan ini.

Tinjauan Umum Batubara Di India

Batubara merupakan salah satu hasil komoditas sumber daya mineral yang penting dalam kehidupan dan pembangunan suatu negara. Batubara merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan untuk pembangkit listrik dan kebutuhan industri. India memiliki sejarah panjang dalam pertambangan batubara komersial sejak abad ke-18 dan pemerintah India mulai melakukan nasionalisasi tambang batubara pada tahun 1970-an. Batubara akan tetap menjadi sumber energi paling penting di India sampai tahun 2030.

India memiliki beberapa wilayah yang menjadi konsentrasi keberadaan batubara dan produksi batubara. Konsentrasi kandungan batubara di India dibagi menjadi dua kelompok sedimen, yaitu Sedimen Gondwana dan Sedimen Tersier. Konsentrasi kandungan batubara

terbesar di India berada di Sedimen Gondwana yang terletak di bagian timur dan tengah India. Konsentrasi batubara di sedimen Gondwana juga ditemukan di bagian timur laut India terutama di negara bagian Assam dan Sikkim.

Pada Sedimen Tersier, batubara ditemukan di bagian timur laut India, yaitu di Arunachal Pradesh, Nagaland, dan Meghalaya. India juga memiliki kandungan batubara jenis *Lignite* yang termasuk ke dalam batubara kelas rendah. Konsentrasi batubara jenis *Lignite* terdapat di negara bagian Tamil Nadu yang terletak di bagian selatan India serta Gujarat dan Rajahstan yang terletak di barat India.

Pada tahun 2017, total cadangan batubara India sebesar 315,14 miliar ton dan cadangan batubara jenis *Lignite* sebesar 44,69 miliar ton. Jumlah cadangan batubara terbesar terdapat pada sedimen Gondwana dengan jumlah cadangan batubara mencapai 313,56 miliar ton. Negara bagian Jharkhand menjadi wilayah dengan cadangan batubara terbesar dengan jumlah 82,44 miliar ton. Negara bagian Jharkhand memiliki cadangan batubara terbesar di India, namun hanya berada di posisi ketiga sebagai negara bagian dengan produksi batubara terbesar di India.

India merupakan negara penghasil batubara ketiga terbesar di dunia menjual batubara mereka di dalam negeri dan luar negeri. India menjual mayoritas batubara produksi mereka di dalam negeri dan menjual batubara mereka ke luar negeri dalam jumlah yang sangat sedikit. India mengeksport batubara sebesar 1,56 juta ton pada tahun 2016, meningkat dari 1,23 juta ton pada

¹³ Ministry of Law and Justice. *Coal Mines (Special Provisions), Act 2015*. Diakses melalui [https://www.prsindia.org/uploads/media/Coal%20Mines/Coal%20Mines%20\(Special%20Provisions\)%20Act,%202015.pdf](https://www.prsindia.org/uploads/media/Coal%20Mines/Coal%20Mines%20(Special%20Provisions)%20Act,%202015.pdf) pada 28 Juni 2019

tahun 2015.¹⁴ Batubara mayoritas diekspor menuju negara-negara terdekat, seperti Bangladesh, Nepal, dan Bhutan.

Tabel Batubara di India (dalam juta ton)

Tahun	Kebutuhan	Produksi
2014/15	819,73	607,63
2015/16	832,38	632,50
2016/17	841,56	650,61
2017/18	896,10	687,83

Sumber: *Annual Report Ministry of Coal* tahun 2014/15 – 2017/18

Pemerintah India memperkirakan kebutuhan batubara pada tahun 2018/19 menjadi lebih dari 900 juta ton. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan batubara untuk industri dan pembangkit listrik. Kebutuhan batubara yang mencapai 819 juta ton dan produksi yang hanya 607 juta ton pada tahun 2014/15 membuat India kekurangan pasokan batubara. Kekurangan kebutuhan batubara sebesar 212 juta ton harus dipenuhi melalui impor.

Pada tahun 2016, lebih dari 500 juta ton batubara dikirim ke berbagai pembangkit listrik di India. Industri-industri, seperti semen, pupuk, bahan kimia, kertas, dan industri kecil dan menengah lainnya juga bergantung pada batubara untuk proses dan kebutuhan energi mereka. Selain digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri, batubara juga digunakan untuk kebutuhan energi pada kereta api dan kegiatan lainnya.

India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok

dengan jumlah penduduk lebih dari 1,33 milyar pada tahun 2017. Jumlah penduduk yang besar tersebut membuat India membutuhkan sumber daya atau energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, salah satunya adalah kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik India mencapai 1.101 kWh per kapita pada tahun 2016.¹⁵ Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2015 kebutuhan listrik India berada pada 1.010 kWh per kapita.

Pengaruh *Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015* Terhadap Perdagangan Batubara India – Indonesia

Pada Desember 2014, pemerintah India mengeluarkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang dinamakan *Coal Mines (Special Provisions), Bill 2015*. RUU tersebut memiliki tujuan untuk memastikan produksi batubara dalam berjalan dengan optimal dan pemanfaatan batubara dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan nasional. Pada tanggal 30 Maret 2015, pemerintah India melalui mengesahkan *Coal Mines (Special Provisions), Bill 2015* menjadi *Coal Mines (Special Provisions), Act 2015*.

Coal Mines (Special Provisions), Act 2015 merupakan UU untuk menyediakan dan pemberian hak, kepemilikan, dan kepentingan atas tambang batubara kepada para penawar (perusahaan). UU ini bertujuan untuk memanfaatkan batubara secara optimal sehingga

¹⁴ Ministry of Mines India. *Op.Cit*

¹⁵ Central Electricity Authority – Ministry of Power India. 2016. *Draft National Electricity Plan Vol. 1*. Diakses melalui http://www.cea.nic.in/reports/committee/nep/nep_dec.pdf pada 26 Februari 2019

dapat meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. UU yang bertujuan untuk optimalisasi batubara ini diharapkan juga dapat menekan atau mengurangi ketergantungan terhadap batubara impor. UU ini memberikan kesempatan lebih besar bagi sektor *private* atau swasta untuk melakukan eksplorasi batubara.

UU tersebut memiliki pengaruh terhadap Indonesia, salah satunya adalah perginya perusahaan batubara asal India dari Indonesia. *Reliance Group*, melalui unit usahanya *Reliance Coal Resources*, menjual tiga tambang batubara mereka di Sumatera Selatan. Tambang tersebut dibeli dari *Sugico Group* pada tahun 2010 dengan luas tambang 40,000 hektar dan dengan cadangan batubara sebesar 2 miliar ton.¹⁶ Penjualan tiga tambang tersebut dilakukan untuk berfokus kepada produksi batubara di India yang memiliki cadangan batubara yang lebih besar.

UU tersebut juga membuat khawatir pengusaha batubara Indonesia. Kekhawatiran pengusaha batubara Indonesia tidak terlalu berlebihan dan hanya dalam jangka pendek dan menengah. Hal yang membuat para pengusaha batubara Indonesia tidak terlalu khawatir adalah nilai lebih yang dimiliki batubara Indonesia. Indonesia memiliki kualitas batubara yang baik karena kadar abu yang rendah. Batubara kualitas ini dapat bekerja

maksimal dan India tetap membutuhkan batubara dengan kualitas baik walaupun ada pengurangan kebutuhan dan volume impor dari Indonesia.

Tabel Impor Batubara India dari Indonesia

Tahun	Volume (juta ton)	Nilai (miliar US\$)
2013	118	5,52
2014	136	5,67
2015	124	4,67
2016	97	3,20
2017	91	3,18

Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Ministry of Mines India* Tahun 2017

Pengaruh disahkannya UU tersebut terhadap Indonesia tidak hanya terjadi pada perginya perusahaan tambang asal India dan pada pengusaha batubara. UU tersebut membuat volume dan nilai perdagangan dari ekspor batubara Indonesia menuju India mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena UU yang disahkan pada Maret 2015 tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi batubara dalam negeri India dan untuk menekan impor batubara. Melalui UU tersebut, India yang sebelumnya menjadi salah satu negara importir batubara terbesar harus mengurangi ketergantungannya terhadap batubara dari negara lain.

Tahun 2014 merupakan puncak dari ekspor batubara Indonesia menuju India dengan volume sebesar 136 juta ton. Pada tahun disahkannya UU tersebut, yaitu pada tahun 2015 ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 juta ton menjadi 124 juta ton. Penurunan volume ekspor kembali terjadi pada

¹⁶ HT Correspondent. *Rpowers buys 3 coal mines in Indonesia for Rs 7,520 cr.* Diakses melalui <https://www.hindustantimes.com/business/rpower-buys-3-coal-mines-in-indonesia-for-rs-7-520-cr/story-qG49VR3z0XwsxKMRsT72KI.html> pada 14 November 2018

tahun 2016 di mana India hanya mengimpor 97 juta ton batubara. Pada tahun 2017, volume ekspor batubara turun hingga 91 juta ton. Berdasarkan data tersebut, UU tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perdagangan batubara Indonesia.

Pada nilai ekspor batubara Indonesia ke India, nilai ekspor batubara ke India pada tahun 2017 hanya US\$ 3,18 miliar.¹⁷ Jumlah tersebut membuat batubara tidak lagi menjadi komoditas ekspor utama Indonesia ke India sejak tahun 2015 atau awal dari penurunan ekspor batubara ke India. Sebelum tahun 2015, batubara menjadi komoditas ekspor utama ke India berdasarkan nilai ekspor. Sejak tahun 2015 dan disahkannya UU tersebut, nilai perdagangan batubara Indonesia ke India terus mengalami penurunan. Hal tersebut juga membuat batubara tidak lagi menjadi komoditas ekspor utama ke India dan digantikan oleh minyak kelapa sawit atau CPO.

KESIMPULAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dan India secara resmi dimulai sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1950-an atau beberapa tahun setelah kedua negara merdeka. Soekarno dan Jawaharlal Nehru merupakan dua pemimpin negara pada saat itu dan juga bapak pendiri atau *founding father* masing-masing negara. Soekarno dan Nehru merupakan teman baik, saat perayaan kemerdekaan India yang pertama, pada 26 Januari 1950, Soekarno hadir sebagai tamu kehormatan.

Kerjasama India – Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai ruang lingkup. Pada ruang lingkup regional, terdapat pada dua kerjasama, yaitu EAS dan ASEAN-India. EAS merupakan forum regional untuk membahas dan menghasilkan kesepakatan maupun kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, energi, perubahan iklim, dan lainnya. ASEAN-India merupakan kerjasama kemitraan yang dimulai pada tahun 1992. Kerjasama ini meliputi berbagai bidang, seperti politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Kerjasama kedua negara dalam ruang lingkup internasional pertama dilakukan pada tahun 1955. Kerjasama ini terjadi karena kedua kepala negara memiliki pemikiran yang sama mengenai terciptanya dunia tanpa kolonialisme yang tertuang dalam KAA. Pemikiran yang sama kembali tertuang dalam Konferensi GNB pada tahun 1961 karena memiliki tujuan dan prinsip yang hampir sama. GNB bertujuan untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, melawan imperialisme-kolonialisme, agresi militer, hegemoni, blok politik, dan lainnya.

Pada kerjasama perdagangan, kedua negara sudah melakukan perdagangan sejak beberapa abad yang lalu dan terus dilakukan hingga saat ini. Kerjasama perdagangan kedua negara secara resmi dilakukan pada tahun 1968 melalui *Trade Agreement between the Government of India and the Government of the Republic of Indonesia*. Kerjasama terbesar kedua negara dilakukan pada tahun 2005 saat Presiden SBY dan PM Manmohan Singh, mendeklarasikan *New Strategic Partnership* dan menyetujui

¹⁷ Ministry of Mines. *Op.Cit*

perdagangan kedua negara dengan nilai US\$ 10 miliar pada 2010.

India merupakan salah satu negara di dunia yang masih memiliki ketergantungan terhadap batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri. Pada tahun 2015/16, kebutuhan batubara dalam negeri India mencapai 832 juta ton. Pada tahun yang sama, jumlah batubara yang dapat diproduksi hanya sebesar 632 juta ton. Kekurangan kebutuhan batubara sebesar 200 juta ton harus dipenuhi melalui impor.

Impor batubara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan batubara yang mencapai 200 juta ton. Impor batubara dilakukan dari beberapa negara, seperti Indonesia dan Australia. Indonesia merupakan eksportir utama batubara bagi India dengan volume ekspor sebesar 124 juta ton pada tahun 2015. Kekurangan kebutuhan batubara yang harus dipenuhi melalui impor memberikan pengaruh terhadap neraca perdagangan India. Pada Desember 2014, pemerintah India mengeluarkan *Coal Mines (Special Provisions), Bill 2015*, yaitu RUU untuk memanfaatkan batubara dalam negeri.

Pada tanggal 30 Maret 2015, pemerintah India mengesahkan UU mengenai tambang batubara yang dinamakan dengan *Coal Mines (Special Provisions), Act 2015*. UU ini bertujuan untuk memastikan produksi batubara dan pemanfaatan batubara dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan nasional. UU yang bertujuan untuk optimalisasi batubara ini diharapkan juga dapat menekan atau mengurangi ketergantungan terhadap batubara impor. UU ini memberikan kesempatan lebih besar bagi sektor

private atau swasta untuk melakukan eksplorasi batubara.

UU tersebut memiliki pengaruh terhadap Indonesia. *Reliance Coal Resources*, perusahaan tambang asal India, menjual tiga tambang batubara mereka di Sumatera Selatan untuk berfokus kepada produksi batubara di India. UU tersebut juga membuat khawatir pengusaha batubara Indonesia. Kekhawatiran pengusaha batubara Indonesia tidak terlalu berlebihan karena nilai lebih yang dimiliki batubara Indonesia. Indonesia memiliki kualitas batubara yang baik karena kadar abu yang rendah sehingga dapat bekerja maksimal.

Pengaruh UU tersebut tidak hanya terjadi pada perginya perusahaan tambang asal India dan pada pengusaha batubara. UU tersebut membuat volume dan nilai perdagangan dari ekspor batubara Indonesia menuju India mengalami penurunan. Melalui UU tersebut, India yang sebelumnya menjadi salah satu negara importir batubara terbesar harus mengurangi ketergantungannya terhadap batubara dari negara lain.

Pada tahun 2015 ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 juta ton menjadi 124 juta ton. Penurunan volume ekspor terus terjadi hingga volume ekspor batubara menuju India hanya 91 juta ton pada tahun 2017. Pada nilai ekspor batubara Indonesia ke India, nilai ekspor batubara ke India pada tahun 2017 hanya US\$ 3,18 miliar. Jumlah tersebut membuat batubara tidak lagi menjadi komoditas ekspor utama Indonesia ke India sejak tahun 2015 atau awal dari penurunan ekspor batubara ke India.

REFERENSI

Jurnal

Singer, J. David. 1961. "The Level-of-Analysis Problem in International Relations." *World Politics*. Vol. 14, No. 1. Tersedia di <http://fbemoodle.emu.edu.tr/pluginfile.php/43812/mod/resource/content/1/Singer%20Levels%20of%20Analysis%20Problem%20in%20IP.pdf> (diakses pada 30 Oktober 2018)

Dos Santos, Theotonio. *The Structure of Dependence*. in K.T. Fann and Donald C. Hodges, eds., *Readings in U.S. Imperialism*. Boston: Porter Sargent, 1971, p. 226 pada Ferraro, Vincent. 1996. *Dependency Theory: The Introduction*. Massachusetts. Mount Holyoke College. Diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/d715/82f1a87a914036b3af3696b2be5e8411a7c8.pdf> pada 27 November 2019

Buku

Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Dokumen Resmi

Central Electricity Authority – Ministry of Power India. 2016. *Draft National Electricity Plan Vol. 1*. Diakses melalui <http://www.cea.nic.in/reports/committee/>

[nep/nep_dec.pdf](#) pada 26 Februari 2019

Ministry of Law and Justice. *Coal Mines (Special Provisions), Act 2015*. Diakses melalui [https://www.prsindia.org/uploads/media/Coal%20Mines/Coal%20Mines%20\(Special%20Provisions\)%20Act,%202015.pdf](https://www.prsindia.org/uploads/media/Coal%20Mines/Coal%20Mines%20(Special%20Provisions)%20Act,%202015.pdf) pada 28 Juni 2019

Ministry of Mines India. *Indian Minerals Yearbook 2017: Part III Mineral Reviews*. Diakses melalui http://ibm.nic.in/writereaddata/files/03202018145834Coal%20and%20Lig_AR_2017.pdf pada 4 Maret 2019

NITI Aayog. *Draft National Energy Policy*. Diakses melalui https://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-ID_27.06.2017.pdf pada 1 Oktober 2019

Internet

Badan Pusat Statistik. *Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan Utama*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1034/ekspor-batu-bara-menurut-negara-tujuan-utama-2002-2015> pada 5 April 2018

Central Intelligence Agency. *The World Factbook*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html> pada 8 Juli 2019.

HT Correspondent. *Rpowers buys 3 coal mines in Indonesia for Rs 7,520 cr*. Diakses melalui <https://www.hindustantimes.com/business/rpower-buys-3->

coal-mines-in-indonesia-for-
rs-7-520-cr/story-qG49VR3
z0XwsxKMRsT72KI.html
pada 14 November 2018

International Energy Agency. *What is energy security?*. Diakses melalui <https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/> pada 7 Oktober 2019

Kementerian BUMN. *Batubara di Indonesia*. Diakses melalui <http://bumn.go.id/bukitasam/berita/2-Batubara-di-Indonesia-Produksi-Ekspor-Batubara-Indonesia> pada 7 November 2018

Saba, Alamsyah Pua. *Waspada Batubara India*. Diakses melalui <http://www.apbi-icma.org/wp-content/uploads/2016/03/Waspada-Batu-Bara-India.pdf> pada 17 Februari 2018

Tim Komunikasi ESDM. *Cadangan Batubara Indonesia Sebesar 26 Miliar Ton*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-indonesia-sebesar-26-miliar-ton> pada 13 Mei 2018

World Bank. *India*. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/country/india> pada 10 Mei 2019